

# IMPLEMENTASI PROGRAM *HOME CARE* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Hanun Nur Azmi Ginting

NPP. 32.0754

Asdaf Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: [hanunnuurazmiginting@gmail.com](mailto:hanunnuurazmiginting@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Social Service Home Care Program is a flagship program of the Banjarbaru City Government's initiative aimed at the abandoned elderly and people with disabilities who have limitations in meeting basic needs. However, in its implementation, the Home Care Program has not been fully able to reach all vulnerable groups of people who need assistance. Purpose:* This study aims to analyze the implementation of the Home Care Program in improving the welfare of the community in Banjarbaru City, South Kalimantan Province, as well as identify supporting and inhibiting factors in its implementation. **Method:** This study aims to analyze the implementation of the Home Care Program in improving community welfare in Banjarbaru City, South Kalimantan Province, as well as identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques carried out through interviews, observations and documentation. The data analyst techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawn. The policy implementation model used as the basis for the analysis is the Van Meter and Van Horn model. **Result:** The results of the study show that this program is considered useful in reaching the poor from the elderly and persons with disabilities who are physically and economically unable to access public services, and are able to make a positive contribution to improving social welfare. **Conclusion:** The implementation of the Home Care Program by the Banjarbaru City Social Service has been running optimally in an effort to improve the welfare of the community. However, some aspects of the Home Care Program still need addition, improvement, and renewal to achieve more effective program implementation. Suggestions that can be given include additional budget allocation for the implementation of the Home Care Program and Optimization of Competent Human Resources (HR).

**Keywords:** *Program Implementation, Vulnerable Communities, Welfare, Home Care Program*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Program Home Care Dinas Sosial merupakan program unggulan inisiatif Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditujukan bagi lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan

dasar. Namun dalam pelaksanaannya, Program *Home Care* belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Home Care dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Home Care dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Model implementasi kebijakan yang digunakan sebagai landasan analisis adalah model Van Meter dan Van Horn. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ini dinilai bermanfaat dalam menjangkau masyarakat miskin dari kalangan lansia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu secara fisik dan ekonomi untuk mengakses pelayanan publik, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. **Kesimpulan:** Implementasi Program Home Care oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru telah berjalan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa aspek dalam Program *Home Care* masih memerlukan penambahan, peningkatan, dan pembaharuan guna mencapai pelaksanaan program yang lebih efektif. Saran yang dapat diberikan antara lain penambahan alokasi anggaran pelaksanaan Program *Home Care* dan Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten.

**Kata kunci:** Implementasi Program, Masyarakat Rentan, Kesejahteraan, Program *Home Care*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi kehidupan yang mencakup aspek sosial, material, dan spiritual, yang ditandai dengan adanya rasa aman, bermoral, dan tenteram secara lahir maupun batin. Keadaan ini memungkinkan setiap individu untuk secara optimal memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara luas (Euis Sunarti, 2012). Keberhasilan pembangunan suatu negara diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat melalui indikator seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan tingkat kemiskinan (Sastrawan et al., 2024).

Di Indonesia menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2024 masih terdapat 9,03% penduduk miskin, dan lebih dari 27 juta orang mengalami kemiskinan multidimensi berdasarkan data dari *Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2023*. Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun termasuk yang memiliki tingkat kemiskinan terendah, tetap menjadi prioritas dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk Kota Banjarbaru (Muhsa & Lydia Rosintan, 2023). Kemiskinan adalah persoalan yang bersifat kompleks dan mencakup berbagai dimensi, serta memberikan pengaruh yang luas terhadap beragam aspek dalam kehidupan masyarakat (Magna & Karisma, 2025)

Berdasarkan data BPS 2024, Kota Banjarbaru memiliki 11.065 penduduk miskin, menempati urutan keempat terendah di Kalimantan Selatan. Namun, garis kemiskinan di kota ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan, bahkan melampaui rata-rata provinsi dan nasional (BPS Kalimantan Selatan, 2024). Kelompok paling rentan adalah lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas, yang menghadapi keterbatasan akses, ekonomi, dan sosial (TNP2K & Kemenkes RI, 2020).

Kontributor utama kemiskinan di Banjarbaru adalah lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas, yang hidup dalam kondisi sangat rentan karena keterbatasan fisik, sosial, dan ekonomi. Lansia umumnya kurang produktif dan bergantung pada orang lain, sementara penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan umum (TNP2K & Kemenkes RI, 2020). Diperkirakan 40% dari lansia berada dalam kondisi sosial ekonomi terbawah (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020), dan sekitar 80% penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan (International Labor Organization, 2011). Ketika seseorang tidak memiliki cukup sumber daya finansial untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, mereka rentan mengalami tekanan ekonomi. Dalam situasi semacam ini, bantuan sosial menjadi salah satu instrumen kebijakan publik yang paling krusial untuk memberikan dukungan finansial, sehingga masyarakat yang terdampak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan lebih layak (Canatan, 2025)

Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru mengimplementasikan Program Home Care, berupa bantuan sosial non tunai seperti sembako dan makanan siap saji yang diberikan kepada lansia terlantar dan penyandang disabilitas (Salsabila et al., 2024). Program ini diatur melalui Perwali No. 11 Tahun 2022 dan SK Wali Kota No. 42 Tahun 2024. Namun, realisasi penerima bantuan masih rendah dibanding jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, pendataan yang belum menyeluruh, kurangnya sosialisasi, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi program Home Care oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai bentuk kesungguhan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Program bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. Bantuan sosial adalah salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu (Suarna et al., 2025). Program bantuan sosial kini telah berkembang secara signifikan dan berperan sebagai instrumen utama dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan serta mewujudkan masyarakat yang lebih adil, terutama di wilayah negara berkembang (Mkojera, 2025). Pemerintah Kota Banjarbaru telah mengimplementasikan Program *Home Care*, yaitu bantuan sosial non tunai berupa sembako dan makanan siap saji yang disalurkan secara langsung ke rumah penerima manfaat. Program ini ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2022 dan SK Wali Kota Nomor 42 Tahun 2024, yang merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan visi peningkatan pelayanan kesehatan dan sosial bagi kelompok rentan.

Namun demikian, meskipun program ini telah berjalan, terdapat kesenjangan nyata antara jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan jumlah penerima manfaat program. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Banjarbaru, realisasi penerima bantuan Home Care masih jauh dari target, menandakan adanya kendala dalam implementasi program.

Permasalahan ini diperparah dengan fakta bahwa lansia dan penyandang disabilitas merupakan penyumbang utama angka kemiskinan di Kota Banjarbaru. Lansia menghadapi masalah penurunan produktivitas, ketergantungan ekonomi, dan risiko sosial lainnya, sedangkan penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan mereka sangat rentan terhadap kemiskinan struktural.

Meskipun banyak penelitian telah membahas mengenai efektivitas program bantuan sosial secara umum, namun penelitian spesifik mengenai implementasi Program *Home Care* di Kota Banjarbaru yang menargetkan kelompok lansia terlantar dan penyandang disabilitas masih sangat terbatas.

Dengan demikian, terdapat kekosongan literatur dan kajian ilmiah (*research gap*) yang perlu diisi untuk memberikan kontribusi terhadap kebijakan publik, khususnya dalam pengembangan program kesejahteraan sosial berbasis kebutuhan lokal dan berbasis kelompok rentan.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam implementasi Program *Home Care* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya lansia terlantar dan penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu disajikan sebagai landasan konseptual yang memperkuat penelitian ini, sekaligus menjadi acuan dalam mengidentifikasi kesenjangan kajian serta menentukan posisi penelitian secara ilmiah. Tinjauan ini dilakukan terhadap sejumlah studi relevan yang membahas implementasi program kesejahteraan sosial, khususnya yang menyoroti kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Penelitian oleh Syarifah Nikmah dan Tjitjik Rahaju (2021) mengevaluasi pelaksanaan *Program Permakanan* di Kota Surabaya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan program berjalan cukup efektif meskipun terdapat kendala pada pencairan dana dan ketidakpastian pengiriman bantuan di beberapa kelurahan. Penelitian ini memiliki kesamaan pada aspek sasaran dan pendekatan, namun berbeda dari sisi fokus, sebab tidak membahas bantuan sembako dan permakanan siap saji sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini.

Selanjutnya, Akbaruddin (2018) meneliti peran Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan program permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Persamaan penelitian ini terletak pada kelompok sasaran, namun perbedaannya berada pada fokus kajian: peran pemerintah dalam penelitian terdahulu, sementara penelitian ini menitikberatkan pada implementasi program.

Penelitian Husna dkk (2021) mengenai implementasi program sembako di Kelurahan Alalak Utara menunjukkan pelaksanaan program berjalan berkelanjutan dan sistematis melalui lima tahapan pelaksanaan. Kesamaan terlihat pada pendekatan yang digunakan dan fokus implementasi, meskipun objek yang dikaji dalam penelitian ini lebih luas karena mencakup bantuan sembako dan permakanan siap saji.

Roxelana (2018) menganalisis program permakanan bagi lansia di Surabaya dengan perspektif *Good Governance*. Hasilnya mengindikasikan pelaksanaan program cukup baik, namun masih terkendala efisiensi pelayanan akibat keterbatasan pegawai. Meskipun sasaran dan pendekatannya serupa, penelitian ini tidak menggunakan kerangka *Good Governance*, melainkan fokus pada implementasi program *Home Care* secara umum.

Terakhir, Syaputri dan Hariyadi (2020) meneliti optimalisasi program permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas melalui pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD). Penelitian ini menyoroti hambatan pelaksanaan program dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Adapun perbedaan mendasar adalah pada fokus, yakni optimalisasi program dalam penelitian terdahulu dibandingkan implementasi program pada penelitian ini.

Secara keseluruhan, kelima penelitian terdahulu memberikan kontribusi dalam memahami pelaksanaan program sosial di berbagai wilayah. Akan tetapi, belum ada yang secara khusus mengkaji implementasi *Program Home Care* di Kota Banjarbaru dengan cakupan bantuan sembako dan makanan siap saji bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan baik dari segi lokasi, objek, maupun pendekatan, serta berkontribusi dalam memperluas literatur mengenai implementasi kebijakan sosial berbasis lokal.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengkaji secara khusus implementasi *Program Home Care* sebagai salah satu bentuk intervensi sosial oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, yaitu lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. Program ini merupakan inovasi kebijakan sosial yang berbasis pada pemberian bantuan sosial non tunai dalam bentuk sembako dan makanan siap saji, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konteks lokasi dan objek kajian yang belum pernah menjadi fokus utama penelitian lain, yaitu Kota Banjarbaru sebagai wilayah dengan garis kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan meskipun memiliki jumlah penduduk miskin yang tergolong rendah. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai dimensi pelaksanaan kebijakan secara sistematis, mulai dari standar kebijakan hingga pengaruh lingkungan sosial dan politik.

Penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti evaluasi program permakanan atau pemberdayaan masyarakat secara umum, karena penelitian ini memadukan dua bentuk bantuan (sembako dan makanan siap saji) yang disalurkan secara langsung kepada kelompok rentan dalam skema kebijakan lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan inovasi pelayanan sosial daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan berbasis lokal.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi *Program Home Care* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan dan dinamika yang terjadi di lapangan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam implementasi Program Home Care dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru, khususnya bagi lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. Pendekatan kualitatif dinilai tepat karena mampu menangkap dinamika sosial yang kompleks dan terus berubah, serta memberikan ruang bagi peneliti untuk terlibat langsung dalam situasi lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2014:205) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan ketika masalah belum jelas dan bersifat kompleks. Analisis data dilakukan secara induktif, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2017:10), untuk memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti, serta memperkuat hubungan interaktif antara peneliti dan informan. Peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu serta diperluas sesuai kebutuhan data (Sugiyono, 2014:85). Penelitian ini juga menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2006:39) yang menekankan enam variabel utama sebagai kerangka analisis, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan sosial lokal dijalankan secara konkret oleh pemerintah daerah dan aktor pelaksana di lapangan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Home Care dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru. Analisis dilakukan berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang mendalam, dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian disusun secara sistematis berdasarkan enam variabel utama dalam model tersebut, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penyajian hasil ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana program dilaksanakan di lapangan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya, sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

### **3.1. Implementasi Program Home Care dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banjarbaru**

Implementasi Program Home Care di Kota Banjarbaru merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi, implementasi program ini dianalisis menggunakan enam variabel utama dalam model Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik

pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami sejauh mana kebijakan ini dilaksanakan secara efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran.

**a. Standar dan sasaran kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi Program Home Care di Kota Banjarbaru telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2024. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, khususnya lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas, melalui pemberian bantuan sosial non tunai berupa sembako dan makanan siap saji. Program ini menyasar individu yang masuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial. Meskipun pelaksanaan program ini sudah selaras dengan standar dan sasaran yang dirumuskan, kendala masih ditemukan, seperti belum meratanya pendataan serta keterbatasan kuota penerima yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan sudah jelas, penyesuaian dengan kondisi lapangan masih menjadi tantangan dalam mencapai sasaran secara menyeluruh.

**b. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Home Care di Kota Banjarbaru. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program ditopang oleh dua aspek utama sumber daya, yakni sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas. Dari sisi sumber daya manusia, keterlibatan Dinas Sosial, camat, lurah, serta tim teknis lapangan menunjukkan adanya pembagian tugas yang cukup jelas, meskipun masih menghadapi keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam menjangkau seluruh sasaran program secara optimal. Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional dan logistik bantuan telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau semua wilayah dan penerima bantuan secara efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program telah berjalan sesuai perencanaan, keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap cakupan dan efektivitas distribusi bantuan di lapangan.

**c. Karakteristik Pelaksana**

Karakteristik pelaksana dalam implementasi Program Home Care di Kota Banjarbaru mencerminkan struktur organisasi yang cukup jelas dan terkoordinasi. Setiap pelaksana, mulai dari Dinas Sosial, camat, lurah, hingga tim teknis lapangan, telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang tidak saling tumpang tindih. Penelitian ini menemukan bahwa para pelaksana bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Secara umum, pelaksana program menunjukkan komitmen dan kepedulian terhadap kelompok sasaran, namun keterbatasan waktu dan kapasitas operasional menjadi tantangan tersendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktur karakteristik pelaksana sudah

mendukung kelancaran program, diperlukan peningkatan koordinasi teknis dan penguatan kapasitas personel agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

**d. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana**

Komunikasi antar organisasi pelaksana dalam Program Home Care di Kota Banjarbaru berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya koordinasi antara Dinas Sosial sebagai pelaksana utama dengan camat, lurah, serta tim teknis lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan melalui forum rapat koordinasi dan arahan teknis yang memungkinkan adanya kesepahaman dalam pelaksanaan program. Selain itu, pelaksana di tingkat kelurahan juga aktif menyampaikan kondisi lapangan kepada pihak Dinas Sosial, sehingga memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi secara menyeluruh dan cepat, terutama terkait perubahan data penerima manfaat dan hambatan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi antarlembaga telah terjalin, dibutuhkan sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan mekanisme informasi yang responsif agar pelaksanaan program dapat lebih efisien dan tepat sasaran.

**e. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana**

Disposisi atau sikap para pelaksana dalam implementasi Program Home Care di Kota Banjarbaru menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program. Para pelaksana, baik dari Dinas Sosial maupun di tingkat kelurahan, secara umum memahami tujuan program dan memiliki sikap positif terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksana tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menunjukkan empati terhadap kondisi lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas sebagai sasaran program. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang memengaruhi intensitas dan respons pelaksana, seperti beban kerja ganda dan keterbatasan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun disposisi pelaksana berada pada level yang baik, efektivitas pelaksanaan program tetap membutuhkan dukungan berupa penambahan personel dan peningkatan kapasitas pelaksana agar sikap positif tersebut dapat diiringi dengan kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

**f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik**

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Kota Banjarbaru memberikan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi Program Home Care. Secara sosial, masyarakat memberikan respons positif terhadap keberadaan program ini karena dinilai membantu meringankan beban hidup kelompok rentan, khususnya lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dukungan dari tokoh masyarakat juga memperkuat legitimasi program di tingkat lokal. Dari sisi ekonomi, kondisi garis kemiskinan yang tergolong tinggi di Kota Banjarbaru menjadi salah satu alasan utama perlunya program ini, sekaligus menjadi tantangan karena jumlah sasaran melebihi kuota bantuan yang tersedia. Sementara itu, secara politik, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ini cukup kuat, tercermin melalui regulasi resmi dan pengalokasian anggaran. Namun demikian, stabilitas dukungan politik perlu dijaga agar keberlanjutan program tidak bergantung pada periode kepemimpinan tertentu. Secara keseluruhan, faktor

lingkungan ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, baik sebagai pendorong maupun tantangan dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial secara merata.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program *Home Care* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banjarbaru**

Dalam implementasi Program *Home Care* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru, terdapat sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan program, namun juga terdapat kendala yang menjadi penghambat di lapangan. Berikut adalah uraian dari kedua kategori tersebut:

#### **a. Faktor Pendukung**

1) Dukungan Kebijakan dari Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan Program *Home Care*, yang tercermin melalui penetapan regulasi seperti Perwali No. 11 Tahun 2022 dan SK Wali Kota No. 42 Tahun 2024, serta dukungan kebijakan dalam RPJMD.

2) Kondisi Geografis Kota Banjarbaru yang Strategis

Letak geografis Kota Banjarbaru yang berada di pusat Provinsi Kalimantan Selatan memudahkan akses distribusi bantuan serta memperlancar koordinasi antarwilayah dan antarinstansi pelaksana.

3) Partisipasi Aktif Masyarakat

Keterlibatan tokoh masyarakat, relawan, dan warga setempat dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan distribusi bantuan menjadi salah satu kekuatan sosial yang mendukung kelancaran implementasi program di lapangan.

#### **b. Faktor Penghambat**

1) Keterbatasan Anggaran

Dana yang tersedia untuk Program *Home Care* masih terbatas sehingga tidak mampu menjangkau seluruh sasaran yang membutuhkan bantuan secara optimal.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah dan kapasitas pelaksana program di lapangan belum memadai, yang berdampak pada keterlambatan distribusi bantuan dan pengawasan yang belum maksimal.

3) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional dan perlengkapan distribusi bantuan masih minim, sehingga menyulitkan pelaksanaan program di wilayah yang aksesnya terbatas.

4) Informasi dan Data yang Tidak Memadai

Validitas dan akurasi data penerima manfaat masih menjadi persoalan, menyebabkan adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

5) Variasi Kondisi Penerima Manfaat

Perbedaan kondisi fisik, sosial, dan geografis antar penerima menyebabkan perlunya pendekatan khusus yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh program.

6) Dinamika Politik Daerah

Perubahan arah kebijakan akibat dinamika politik lokal dapat mempengaruhi kontinuitas dan prioritas program, sehingga memerlukan komitmen lintas kepemimpinan agar program tetap berlanjut.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Home Care oleh Pemerintah Kota Banjarbaru telah berjalan sesuai arah kebijakan daerah yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. Program ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial non tunai dalam bentuk sembako dan makanan siap saji yang disalurkan langsung ke rumah penerima manfaat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Home Care dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru dapat dipahami melalui enam variabel utama sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut saling berinteraksi dan secara menyeluruh mencerminkan bagaimana Pemerintah Kota Banjarbaru menjalankan kebijakan sosial yang ditujukan kepada kelompok rentan seperti lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

Pelaksanaan program telah memenuhi standar dan sasaran kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perwali Nomor 11 Tahun 2022 dan SK Wali Kota Nomor 42 Tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya sarana operasional. Selain itu, data penerima manfaat yang belum sepenuhnya akurat serta variasi kondisi sosial dan geografis menjadi tantangan dalam menjangkau sasaran secara merata. Kendati demikian, komitmen pemerintah, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat telah menjadi faktor pendukung penting yang memungkinkan program ini tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi penerima.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nikmah & Rahaju, 2021), (Akbaruddin, 2018), dan (Roxelana, 2018) yang menemukan bahwa walaupun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, program bantuan sosial berupa permakanan siap saji dan paket sembako terbukti mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan. Bantuan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepedulian sosial bagi kelompok lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang selama ini kurang terjangkau oleh intervensi formal. Keberadaan program ini menunjukkan bahwa intervensi sosial berbasis kebutuhan langsung masih sangat relevan dan dibutuhkan, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan seperti pada hasil penelitian Husna et al., (2021) yang menunjukkan dengan pemberian dan pelaksanaan program bantuan sosial secara kontinu atau berkelanjutan setiap bulannya. Selain itu, penelitian menunjukkan implementasi program dapat terlaksana sebab stakeholders atau pihak pelaksana alur koordinasi berjalan dengan baik karena ada aturan jelas dan masyarakat yang terbuka akan suatu kendala atau permasalahan berkaitan dengan program. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Syaputri & Hariyadi (2020) yang menyatakan

bahwa Perwali masih belum dapat berjalan dengan optimal. Perbedaan hasil penelitian mengenai Program Home Care dapat disebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian yang secara langsung memengaruhi karakteristik sosial dan budaya masyarakat penerima manfaat. Setiap wilayah memiliki tantangan tersendiri dalam hal distribusi, penerimaan masyarakat, serta kapasitas pelaksana, sehingga pelaksanaan Program Home Care bisa menunjukkan hasil yang berbeda meskipun kebijakan yang digunakan memiliki kerangka yang serupa.

Menariknya, Program Home Care adalah sebuah bantuan yang pendekatannya yang bersifat humanis dan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat rentan. Program ini tidak hanya menyalurkan bantuan secara fisik berupa sembako dan makanan siap saji, tetapi juga mengedepankan pelayanan yang berbasis kepedulian sosial, di mana bantuan diantarkan langsung ke rumah penerima serta adanya pemantauan terhadap kondisi kesehatan dan kondisi lingkungan tempat tinggal penerima bantuan. Hal ini mencerminkan bentuk kehadiran pemerintah hingga ke tingkat individu yang paling membutuhkan, seperti lansia terlantar dan penyandang disabilitas, yang sering kali terpinggirkan dari akses layanan sosial. Pendekatan ini menciptakan rasa dihargai dan diperhatikan bagi para penerima, serta memperkuat solidaritas sosial di lingkungan masyarakat sekitar. Keterlibatan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program juga menjadi nilai tambah dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan sosial pemerintah.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya menguatkan sejumlah hasil studi terdahulu yang menyoroti pentingnya kebijakan sosial dalam menanggulangi kemiskinan, tetapi juga memberikan kontribusi empiris yang baru dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat lokal, khususnya bagi masyarakat dalam kondisi rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan secara langsung dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang sering kali terabaikan, serta menunjukkan bahwa pendekatan berbasis layanan langsung ke rumah dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara nyata.

#### **3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi politik di tingkat lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan Program Home Care. Program ini merupakan bagian dari realisasi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdahulu, yang kemudian diinstitutionalisasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwali), diperkuat oleh Surat Keputusan Wali Kota, serta diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru. Keberadaan payung hukum ini menjadikan program memiliki legitimasi formal dan arah pelaksanaan yang jelas. Namun demikian, keberlanjutan program ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, khususnya pergantian kepemimpinan. Di tengah kondisi tersebut, pelaksanaan program terbukti memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat rentan, seperti lansia terlantar dan penyandang disabilitas, yang secara langsung merasakan manfaat bantuan sosial berupa makanan siap saji dan sembako. Tingginya antusiasme dan harapan masyarakat agar program ini tidak hanya berlanjut tetapi juga diperluas cakupannya menunjukkan bahwa Program Home Care telah menjadi kebutuhan sosial yang relevan dan mendesak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan program ini melalui kebijakan yang lebih inklusif dan transformatif, terlepas dari dinamika politik yang terjadi.

#### IV. KESIMPULAN

Implementasi Program Home Care oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru telah berjalan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari perbaikan kondisi kesehatan masyarakat rentan, tercukupinya kebutuhan dasar, serta dampak nyata yang dirasakan adalah adanya keringanan dalam beban pengeluaran bulanan. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, banyak dari masyarakat berharap program ini terus dilanjutkan dan kuota penerima manfaat ditingkatkan. Namun, beberapa aspek dalam Program Home Care masih memerlukan penambahan, peningkatan, dan pembaharuan guna mencapai pelaksanaan program yang lebih efektif.

Faktor pendukung dalam implementasi Program Home Care mencakup dukungan kebijakan dari pemerintah, kondisi geografis Kota Banjarbaru yang strategis, serta partisipasi aktif masyarakat. Beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan anggaran yang tersedia, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), serta kurangnya sarana dan prasarana. Selain itu, informasi dan data yang tidak memadai, variasi kondisi penerima manfaat, dan perubahan dinamika politik di daerah dapat menjadi tantangan terhadap pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut agar Program Home Care dapat berlangsung lebih maksimal dan berkelanjutan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan waktu pengumpulan data yang relatif terbatas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika implementasi Program Home Care secara menyeluruh di Kota Banjarbaru. Selain itu, perubahan kondisi penduduk dan situasi para penerima manfaat, yang sebagian besar berada dalam usia lanjut dan kondisi kesehatan yang rentan, menyebabkan terjadinya dinamika data yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan kemungkinan perubahan status penerima manfaat secara berkala, baik karena perpindahan domisili, penurunan kondisi fisik, maupun kematian. Oleh karena itu, validitas dan pembaruan data secara rutin menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Program Home Care, yang sangat bergantung pada keakuratan informasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah dan durasi pengamatan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program Home Care di Kota Banjarbaru. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak program terhadap aspek kesejahteraan secara lebih terukur. Mengingat Kota Banjarbaru terus berkembang sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, studi yang mengkaji integrasi Program Home Care ke dalam sistem perlindungan sosial daerah secara lebih sistemik juga sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru beserta seluruh jajaran, staf, dan pejabat terkait atas kesempatan, dukungan, serta fasilitas yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, serta Bapperisetda Kota Banjarbaru, atas dukungan, izin, dan kerja sama yang diberikan. Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbaruddin, S. (2018). Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Program Permakanan Oleh Dinas Sosial Di Kota Surabaya [Universitas Airlangga]. In *Doctoral Dissertation Universitas Airlangga*. [https://repository.unair.ac.id/74671/3/JURNAL\\_Fis.AN.80\\_18\\_Akb\\_p.pdf](https://repository.unair.ac.id/74671/3/JURNAL_Fis.AN.80_18_Akb_p.pdf)
- Canatan, B. (2025). Investigating the Impact of Social Assistance and Borrowing Behavior on Investigating the Impact of Social Assistance and Borrowing Behavior on Reducing Economic Worries. *EGE AKADEMIK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW*, February. <https://doi.org/10.21121/eab.20250203>
- Husna, H., Ariyani, E., & Azwari, T. (2021). Implementasi Program Sembako Di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3843>
- International Labor Organization. (2011). Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Reader Kit. In *Reader Kit*. <https://www.ilo.org/research-and-publications>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan Kemensos untuk Kesejahteraan Sosial Lansia*. <https://kemensos.go.id/kebijakan-kemensos-untuk-kesejahteraan-sosial-lansia>
- Magna, M. S., & Karisma, S. (2025). *Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M. Friedman's Theory*. 5(4), 2982–2990. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Mkojera, I. C. (2025). Merits and Demerits of Social Assistance Programs to Poor People. *Journal of Rural Sociology, Microfinance, and Poverty Studies (JRSMPs)*, Volume 2(Issue 1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.54536/jrsmpls.v2i1.4209>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013). *Munawir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawir*.
- Muhsa, T. T., & Lydia Rosintan. (2023). Analisis Variabel Tingkat Kemiskinan Kota/Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 799–814. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15594>
- Nikmah, S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 195–210. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p195-210>
- Roxelana, S. (2018). Implementasi program Permakanan Lanjut Usia (Lansia) Dinas Sosial Kota Surabaya Dilihat dari Perspektif Good Governance [Universitas Airlangga]. In *Administrasi Negara* (Vol. 1, Issue 1). <https://repository.unair.ac.id/67809/3/Sec.pdf>
- Salsabila, A., Retpitari, E., Faqih, M., & Prasetyo, H. B. (2024). Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga. *Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1), 31–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.897>
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473–479. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11642>

- Suarna, N., Ali, I., Efendi, D. I., & Cirebon, S. I. (2025). Optimizing the Social Assistance Recipient Model in Cangkring Village Using the Naïve Bayes Algorithm. *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications*, 4(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.59934/jaiea.v4i2.849>
- ugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Sunarti, E. (2012). Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan. *Skripsi. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*, 21. [https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/54504/Dr. Euis Sunarti---Indikator Keluarga Sejahtera.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/54504/Dr._Euis_Sunarti---Indikator_Keluarga_Sejahtera.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Syaputri, M. D., & Hariyadi, Y. S. (2020). Optimalisasi Program Perumahan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Usia Lanjut Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 85–89.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); Cetakan 1). *Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung*.
- TNP2K, & Kemenkes RI, K. K. (2020). Situasi lansia di Indonesia dan akses terhadap program perlindungan sosial: In *Kementerian Kesehatan RI* (Vol. 10, Issue 2). <https://kms.kemkoptm.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=818&bid=591>

